

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis rasio efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan yang ada pada Peraturan Kepmendagri Tahun 1996 dapat disimpulkan kinerja keuangan Desa Horinara adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 dengan perolehan skor adalah 68% dengan kriteria B (Sedang) terletak pada $56 < \text{Total Skor} \leq 68$.
2. Pada tahun 2020 dengan perolehan skor adalah 29% dengan kriteria C (buruk) terletak pada $15 \leq \text{Total Skor} \leq 35$.
3. Pada tahun 2021 dengan perolehan skor adalah 63% dengan kriteria B (Sedang) terletak pada $56 < \text{Total Skor} \leq 68$.
4. Berdasarkan hasil analisis maka di peroleh 2 tahun dalam kriteria B (sedang). Kemudian penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tahun 2020 yaitu berada pada kriteria C (buruk) terletak pada $15 \leq \text{Total Skor} \leq 35$. yang menandakan bahwa kinerja keuangan Desa Horinara cukup baik.

Berdasarkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Horinara lihat dari pertanggungjawaban desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Horinara bersifat administrative berupa Surat PertanggungJawaban (SPJ) atas pengawasan Camat melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selain bentuk pertanggungjawaban secara administratif, Desa juga mengadakan rapat evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Desa Horinara juga berpatokan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6.2 Saran

Berkaitan dengan hasil analisis dan kesimpulan yang telah di uraikan, maka adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Desa Horinara

Diharapkan pihak aparat desa meningkatkan kinerja keuangan desa dan meningkatk pendapatan asli desa (PAD) agar dapat melaksanakan secara maksimal, baik untuk pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta untuk aktivitas Desa Horinara lainnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian di bidang kinerja keuangan pada suatu perusahaan, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait dengan analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan dengan metode penelitian yang sama dan Desa yang berbeda guna keberlakuan temuan ini secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Malang)*. Hal 4
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohan, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jember*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, (Online), Vol. 2, No. 3, (<http://ejournal.upi.ac.id/index.php/JRAK/article/>, diakses 05 November 2022).
- Eva, Yuyu Sri. 2019. “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektifitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”. Skripsi. Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Garrison, N. dan (2000) *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gramini, M., Kasim, M.Y., & Bidin, C.R. (2017). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali pada Periode 2011-2015*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, (Online), Vol. 3, No. 1, (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index/>, diakses 05 November 2022).
- Kusumadewi, W.N., & Ilat, V. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014*. *Jurnal EMBA*, (Online), Vol. 4, No. 1, (<http://ejournal.unsurat.ac.id/index/emba/>, diakses 04 November 2022).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Rantebalik, B., Tawakkal, & Sutrisna, A.S. (2016). *Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, (Online), Vol. 9, No. 2, (<http://jurnal.untirta.ac.id/index/jrat/>, diakses 6 Maret 2019).
- Soeharjo, E. D. (2017). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes Tahun 2015 berdasarkan Pemdagri No. 113 Tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta*. *Jurnal Of Governance and Public Policy*, (Online), Vol. 4, No. 3, (<http://journal.umy.ac.id/index.php/article/>, diakses 28 April 2019).
- Subramanyam, K.R. (2017). “Analisis Laporan Keuangan”. Edisi Kesebelas. Jakarta: Salemba Empat

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)*. Cetakan Kedua. Bandung. Alfabeta.
- Sumarna , A. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Desa Ciburial Tahun Anggaran2013-2014*. (Online), (<http://ciburial-desasid.cdn.approject.org/>, diakses 28 April 2019).
- Permendagri (2013) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Puspawardani, W. (2017). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaoleh Pemerintah Desa di Desa Parakan manggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pengandaran*. Dipetik April 28, 2019. Jurnal Dinamika, (Online), Vol. 4, No. 1, (<http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/>, diakses 5 November 2022).